

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perspektif Administrasi Publik, kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang *urgent*. Salah satu fungsi utama dari administrator publik adalah dapat membuat keputusan dan merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan publik (Rosenbloom & Kravchuk, 2005, Jones, 2004). Kehadiran kebijakan public sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah publik dan untuk memenuhi kebutuhan publik. Masalah-masalah tersebut muncul karena adanya tuntutan-tuntutan publik akan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan adanya keterbatasan sumber-sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tersebut (Alwi, 2022). Oleh karena itu, penyelesaian masalah dan kebutuhan publik merupakan hal yang kompleks karena penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik bukan lagi domain pemerintah saja, akan tetapi perlu keterlibatan dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan lainnya, seperti sektor swasta dan non pemerintah. Keberhasilan suatu kebijakan akan sangat bergantung pada keterlibatan para aktor (Rukmana et al., 2020).

Kompleksitas terjadi karena para aktor yang terlibat memiliki latar belakang yang berbeda dan kepentingan yang berbeda (Klijn, 2008, Klijn & Koppenjan, 2016). Kompleksitas tersebut dapat dikelola agar tidak menjadi hambatan dalam mengintervensi masalah publik, yaitu dengan menciptakan *trust* atau kepercayaan dalam proses kolaborasi dan interaksi. Hal tersebut penting untuk menciptakan *Trust* atau kepercayaan, karena untuk mengembangkan dan menjaga efektivitas jaringan antar organisasi dibutuhkan kerja sama, keputusan

memerlukan informasi dari berbagai pihak, dan tentunya kepercayaan dapat memungkinkan para actor bertukar informasi, pengetahuan atau ide secara terbuka (Klijn et al., 2010). Kompleksitas ketahanan pangan merupakan isu yang mendesak baik secara nasional maupun internasional (Rukmana et al., 2020). Selain itu, banyaknya pemangku kepentingan yang sangat bervariasi dan dari latar belakang yang berbeda menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.

Sebagai salah satu daerah agraris di Indonesia, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang membutuhkan perhatian khusus. Kabupaten Maros memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan, akses terhadap teknologi pertanian, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung lainnya. Dilansir dari Wikipedia Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah lumbung padi di Sulawesi Selatan. Luasnya area persawahan dan juga iklim yang mendukung menjadikan Kabupaten Maros setiap tahun selalu swasembada beras karena sebagian besar produksi padi di Kabupaten Maros dihasilkan oleh jenis padi sawah. Jenis padi ini menyumbang 98,99 % dari seluruh produksi padi. Sedangkan 1,01 % dihasilkan oleh padi ladang. Produksi jagung Kabupaten Maros pada tahun 2018 sebesar 488.101.029 kwintal dengan luas panen 9.556 ha. Akan tetapi, sekitar 26.000 ha lahan pertanian di Kabupaten Maros hilang selama sepuluh tahun terakhir karena sebagian besar telah disulap menjadi perumahan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa bahan produksi padi berkurang akibat adanya alih fungsi lahan. Selain itu, tren luas panen padi di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi pada tahun-tahun terakhir, yang berdampak pada ketersediaan pangan di tingkat lokal dan ketahanan rumah tangga. Kurangnya jumlah tenaga pendamping juga berdampak pada kurang optimalnya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Dalam

upaya mewujudkan kebijakan ketahanan pangan yang berkelanjutan, diperlukan mekanisme koordinasi yang efektif melalui *governance networks* yang berbasis pada kepercayaan antar para aktor yang terlibat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan ketahanan pangan yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebut sebagai bentuk *governance network*. Salah satunya adalah dengan memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2021 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Ketersediaan pangan di setiap daerah menjadi tanggung jawab setiap Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bisa bekerja sama dengan mengintegrasikan sumber-sumber daya melalui *resources sharing* dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan pangan sebagai domain publik.

Masalah gizi dan Kesehatan menjadi indikator penting untuk mengetahui efektivitas kebijakan pangan. Diketahui, prevalensi stunting di Kabupaten Maros berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 sebesar 30,1% (kategori sangat tinggi) angka ini telah mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 37.5%. Tingginya angka stunting mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga masih belum optimal. Hal ini menegaskan bahwa di tingkat lokal ada Kelompok Wanita Tani (KWT) yang memiliki peran penting dalam upaya penyediaan pangan yang bergizi untuk keluarga. Upaya ketahanan pangan yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan atau pengelolaan pekarangan, produksi hortikultura, dan diversifikasi konsumsi pangan. Program nasional seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang melibatkan KWT sebagai pelaksana atau penggerak dirancang untuk bisa memperkuat

kemandirian pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi serta dapat mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Walaupun terdapat program dan bantuan yang diarahkan kepada KWT, seperti penyaluran dana bantuan P2L atau Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk berapa KWT di Kabupaten Maros, tidak menutup kemungkinan jika implementasi dilapangan masih sering ditemui hambatan struktural ataupun kelembagaan. Adanya keterbatasan sumber air dan sarana irigasi atau peralatan pertanian yang terbatas. Selain itu, beberapa produk KWT, seperti hasil olahan dari pisang dan roti-roti sulit dijual karena tidak ada distribusi atau kerja sama pemasaran. Terkait hambatan kelembagaan yang dihadapi adalah kurangnya pendamping atau penyuluh, menyebabkan penyuluh dalam satu Desa bisa membawahi 3-5 KWT. Selain itu, pengurus berganti-ganti, atau tidak ada pembagian tugas yang jelas. Serta beberapa KWT hanya aktif ketika ada bantuan, sehingga keberlanjutan program menjadi terganggu dan tidak berjalan efektif. Hambatan-hambatan ini dapat membuat kontribusi KWT terhadap ketahanan pangan rumah tangga dan ketahanan pangan lokal berpotensi tidak maksimal, kecuali ada penguatan kelembagaan, pembentukan modal sosial, dan koordinasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di tingkat KWT tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, seperti ketersediaan sumber daya, sarana, ataupun akses pasar, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas hubungan antar aktor dalam jaringan tata kelola (*governance networks*). Dalam kerangka *Trust in Governance Networks*, kepercayaan menjadi modal sosial penting yang dapat memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas aktor, baik antar KWT dengan pemerintah daerah,

tenaga penyuluh, maupun aktor lain yang terlibat. *Trust* dalam *governance networks* menjadi perekat utama yang memungkinkan interaksi, koordinasi, dan distribusi sumber daya berjalan dengan baik. Jika *trust* rendah, jaringan akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, upaya membangun dan mempertahankan kepercayaan antara aktor dalam jaringan sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan suatu kebijakan.

Trust dalam jaringan pemerintahan (*trust in governance networks*) memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa setiap pihak dapat berkontribusi secara optimal, berbagi sumber daya, serta menjalankan perannya masing-masing agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Menurut Klijn & Koppenjan (2016), jaringan dengan tingkat kepercayaan tinggi lebih mampu mengelola kompleksitas kebijakan melalui pertukaran informasi yang lebih efektif, adanya kepedulian dan kesadaran, saling menunjang dalam memenuhi kebutuhan sumber daya organisasi, adanya kebutuhan finansial, dan dapat mengurangi konflik-konflik dalam organisasi. *Trust* dapat membangun keyakinan bahwa semua pihak akan berkontribusi, berbagi risiko, dan mendapatkan manfaat secara adil. Tanpa kepercayaan yang kuat, kebijakan ketahanan pangan sulit mencapai keberlanjutan, karena keberhasilan jaringan tata kelola sangat bergantung pada sinergi aktor yang saling mempercayai dan berkomitmen terhadap tujuan bersama.

Karena adanya masalah-masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Maros, khususnya melalui peran Kelompok Wanita Tani (KWT). Tidak hanya bergantung pada kualitas hubungan antaraktor yang terlibat didalamnya. *Trust* dalam *governance networks* menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas koordinasi, kolaborasi dan keberlanjutan program. Rendahnya tingkat kepercayaan dapat menghambat sinergi, memperlambat aliran

informasi, dan melemahkan komitmen bersama, sehingga potensi KWT dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga maupun lokal tidak dapat dimaksimalkan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara empiris bagaimana *trust* terbangun, dipelihara, atau bahkan terhambat dalam jaringan tata kelola kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Melalui pendekatan ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana *trust* dalam *Governance Networks* dan bagaimana strategi untuk meningkatkan *trust* dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Maros?”**.

1.2. Tinjauan Teori

1.2.1. *Governance Networks*

Governance Networks atau jaringan tata kelola adalah studi jaringan yang memiliki fokus terhadap koordinasi organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengatasi masalah penyelenggaraan dan kebijakan publik. Masalah tersebut akan diatasi dan diselesaikan dengan melibatkan banyak aktor atau pemangku kepentingan dan tentunya memerlukan jaringan hubungan di antara aktor-aktor yang terlibat (Klijn & Koppenjan, 2016). Dalam *governance networks* dibutuhkan kolaborasi antar aktor atau pemangku kepentingan. Sehingga, menuntut adanya sinergitas dan interaksi dalam kolaborasi. Proses interaksi dalam kolaborasi ini tentu menunjukkan adanya ketergantungan dari berbagai aktor yang terlibat, yang mana hal tersebut merupakan sumber daya utama untuk melahirkan atau menciptakan suatu kebijakan. Hal tersebut menimbulkan kompleksitas karena para aktor memiliki latar belakang, keahlian, dan kepentingan serta perspektif yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik juga menjadi beragam.

1.2.2. Kepercayaan (*Trust*)

Menurut (Klijn et al., 2010) *trust* atau kepercayaan dalam jaringan dipandang sebagai persepsi atau keyakinan bahwa aktor lain memiliki niat baik. Yang mana seorang aktor dapat mempercayai bahwa aktor lain tidak akan merugikan mereka dalam proses kerja sama. Hal ini berarti orang yang percaya memberikan akses atau kesempatan kepada aktor lain dengan harapan bahwa pihak tersebut akan bertindak sesuai dengan ekspektasi yang positif. Kepercayaan ini mencakup keyakinan bahwa pihak lain tidak hanya akan menghindari perilaku yang merugikan, tetapi juga akan bertindak sesuai dengan apa yang dianggap adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Kepercayaan memiliki peran yang penting dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan publik. Karena kepercayaan dapat membangun hubungan antar organisasi yang lebih baik, terciptanya pertukaran informasi, adanya kesadaran, dan saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan sumber daya organisasi, kebutuhan finansial, serta dapat mengurangi konflik dalam jaringan (Klijn & Koppenjan, 2016). Selain itu, kepercayaan yang tinggi dalam suatu jaringan akan mendorong para aktor untuk bisa lebih terbuka dalam berbagi informasi dan inovasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *trust* dianggap sebagai indikator yang penting untuk membangun hubungan antar-organisasi dalam jaringan. Dengan adanya *trust* ini, maka para aktor akan melakukan interaksi guna mendapatkan informasi atau bertukar informasi, meningkatkan koordinasi atau kerja sama, dan dapat tercipta pertukaran sumber daya (Klijn & Koppenjan, 2016). Menurut (Klijn & Koppenjan, 2016) semakin banyak interaksi dan kontak sosial yang terjadi, maka semakin tinggi kepercayaan yang tercipta. Menurut Stewarts (2004:104), dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan adanya kerjasama antar berbagai aktor dalam jaringan. Dalam hal ini, pemerintah dituntut agar mampu membangun jaringan kerja sama antar aktor untuk mencapai tujuan dari

suatu kebijakan guna menyelesaikan masalah yang kompleks. Selanjutnya adalah pertukaran sumber daya, pada dasarnya para aktor tidak akan mampu mencapai tujuan-tujuannya tanpa menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh aktor lain (Pratikono, 2010:114). Maka dari itu, dengan adanya pertukaran sumber daya, maka akan menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja kebijakan.

1.2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait *trust* dalam *governance networks* sebelumnya yang menjadi perbandingan pengembangan fokus dalam studi ini, diantaranya sebagai berikut:

Table 1. 1Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Tujuan	Hasil
1.	(Klijn et al., 2010)	<i>Trust in Governance Networks: Its Impacts on Outcomes</i>	Mengkaji tentang pentingnya kepercayaan dalam jaringan tata kelola (<i>Governance Networks</i>) dan dampaknya terhadap hasil kerja sama atau kolaborasi. Serta menjelaskan bagaimana manajemen jaringan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan antar actor.	• <i>Trust</i> dilihat dari segi pencapaian hasil. Sedikit sekali artikel yang mengkaji tentang <i>trust</i> yang berdampak pada hasil • Kepercayaan dipengaruhi oleh strategi manajemen jaringan, seperti peningkatan interaksi dan informasi • Kepercayaan dapat dikembangkan dan dipertahankan melalui strategi manajemen jaringan
2.	(Schilke & Cook, 2013)	<i>A Cross-Level Process Theory of Trust Development In Interorganizational Relationships</i>	Mengkaji tentang interaksi kepercayaan dari level mikro (hubungan individu dalam organisasi) hingga makro (bagaimana dinamikanya dalam organisasi).	• Melihat pengembangan kepercayaan dalam hubungan antar organisasi dari level micro dan macro (Jenjang atau Tingkatan). • Kepercayaan pada tingkat individu memainkan peran penting dalam menciptakan kepercayaan antarorganisasi. Sebaliknya, kepercayaan antarorganisasi dapat memperkuat hubungan interpersonal antar individu di organisasi yang berbeda.
3.	(Termini & Kalafatis, 2021)	<i>The Paradox of Public Trust Shaping Local Climate Change Adaptation</i>	Mengkaji tentang bagaimana tantangan yang dihadapi dalam mengelola persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Karena masyarakat cenderung merasa percaya dan mengandalkan pihak berwenang untuk mengambil keputusan, tanpa berpartisipasi aktif	Proses interaksi atau komunikasi antar actor dapat meningkatkan kepercayaan baik dalam hubungan individu-individu (antarpribadi), individu-organisasi (kelembagaan), dan organisasi-organisasi (antarorganisasi).
4.	(Emborg et al., 2020)	<i>A Framework for Exploring</i>	Mengkaji tentang bagaimana kepercayaan	Melalui kerangka kerja yang komprehensif ini, Emborg, Daniels, dan

		<i>Trust and Distrust in Natural Resource Management</i>	dapat berpengaruh terhadap efektivitas kolaborasi atau kerja sama dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Selain itu, artikel ini juga mengkaji tentang kepercayaan dan ketidakpercayaan (Distrust).	Walker berkontribusi signifikan dalam literatur pengelolaan sumber daya alam dengan menyediakan alat analisis yang mendalam untuk memahami dinamika kepercayaan dan ketidakpercayaan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara teori kepercayaan dan praktik manajemen sumber daya alam, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
5.	(Sloan & Oliver, 2013)	<i>Building Trust in Multi-stakeholder Partnerships: Critical Emotional Incidents and Practices of Engagement</i>	Berfokus pada bagaimana kepercayaan dapat tercipta melalui kejadian emosional yang kritis (Critical Emotional Incidents) dan praktik keterlibatan yang efektif (Emotional Engagement Practices). Tujuannya adalah untuk memahami kepercayaan, sehingga dapat dikembangkan dan dipertahankan dalam sebuah hubungan.	• <i>Critical Emotional Incidents</i> berpengaruh terhadap kepercayaan. Yang meliputi keberhasilan dan penyelesaian tantangan atau masalah yang ada. • <i>Emotional Engagement Practices</i> berpengaruh terhadap kepercayaan. Yang meliputi transparansi, kejujuran, dan komitmen. Serta bagaimana partisipasi semua actor dalam organisasi. Praktik keterlibatan emosional dapat digunakan oleh para mitra untuk mengubah emosi negatif menjadi emosi positif, yang mendorong pengembangan kepercayaan dalam pengaturan ini.
6.	(Tahlill & Alwi, 2017)	<i>Creating a Trusted Public Organization: Organizational Trust Analysis in Implementation Network of the Education Quality Assurance Policy in Indonesia</i>	Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis perspektif kepercayaan organisasi dalam jaringan implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.	Model kepercayaan organisasi integrative (integrative model of organizational trust). Yang meliputi aspek integritas, kebajikan, dan kompetensi. merupakan dimensi penting yang perlu ditingkatkan dalam menciptakan kepercayaan organisasi. Model integratif kepercayaan organisasi diusulkan sebagai model yang perlu diterapkan untuk meningkatkan jaringan implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia
7.	(Rukmana et al., 2020)	<i>Complexity and Public Policy: Network Model of</i>	Studi ini menyoroti interaksi aktor, pola komunikasi, dan koordinasi dalam jaringan	Proses interaksi sangat rentan menimbulkan kompleksitas dalam jaringan organisasi. Akan tetapi, Kompleksitas dalam jaringan

		<i>Food Security Policy Implementation in Bone Regency</i>	implementasi kebijakan.	pemerintahan adalah hal yang alami dan tidak dapat dihindari. Sehingga, hasilnya menunjukkan rendahnya kepercayaan antar-aktor, terbatasnya pertukaran sumber daya, dan kualitas berbagi informasi yang kurang optimal, yang memengaruhi efektivitas kebijakan secara keseluruhan.
8.	(Martins et al., 2019)	<i>Activities in the Context of a Network, Trust and Internal Resources as Antecedents of the Effectiveness of Network Governance: a Study of the Impact on the Performance of the Companies Involved</i>	Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengidentifikasi bagaimana aktivitas jaringan, kepercayaan, dan sumber daya internal memengaruhi efektivitas tata kelola jaringan. 2. Menilai dampak efektivitas tata kelola jaringan terhadap kinerja perusahaan yang menjadi bagian dari jaringan.	• <i>Network Activities/Performance</i>. Bagaimana aktivitas dalam jaringan berpengaruh terhadap kepercayaan dan efektivitas <i>network governance</i>. • Pengaruh kepercayaan terhadap efektivitas <i>network governance</i>. • Pengaruh sumber daya internal terhadap efektivitas <i>network governance</i>. Ketiga elemen ini dianggap sebagai antecedents (faktor pendahulu) yang menentukan efektivitas tata kelola jaringan (<i>network governance effectiveness</i>) dan berdampak pada kinerja perusahaan.
9.	(Gedeona, 2013)	<i>Theoretical Review of Network Management in Public Policy Studies.</i>	Mengkaji tentang bagaimana pengelolaan jaringan (<i>networking management</i>) sebagai pendekatan yang relevan dalam konteks studi kebijakan publik. Hendrikus T. Gedeona mengeksplorasi pentingnya jaringan kerja dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan public. Serta untuk memahami bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan dapat berkolaborasi secara efektif melalui pengelolaan jaringan.	Pengelolaan jaringan yang baik dalam kebijakan publik memerlukan dua hal utama: 1. Pemahaman dinamika interaksi antar aktor Setiap aktor dalam jaringan memiliki kepentingan, perspektif, dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, memahami bagaimana mereka berinteraksi, bernegosiasi, dan bekerja sama sangat penting agar kebijakan dapat diterapkan dengan efektif. 2. Kemampuan mengkoordinasikan kepentingan dan sumber daya Karena setiap aktor memiliki sumber daya yang berbeda (misalnya

				keahlian, sumber daya, atau kepentingan), maka dari itu seorang pengelola jaringan harus mampu menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut agar mencapai tujuan bersama.
10.	(Nilsson, 2019)	<i>Proximity and The Trust Formation Process</i>	Bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana <i>proximity</i> (kedekatan) mempengaruhi proses pembentukan meningkatnya <i>trust</i> (kepercayaan).	• Kedekatan (<i>proximity</i>) dapat mempercepat pembentukan kepercayaan, terutama dalam tahap awal hubungan kerja sama. • <i>Proximity</i> sosial dan institusional memiliki dampak signifikan dalam membentuk kepercayaan yang berkelanjutan, dibandingkan dengan <i>proximity</i> geografis. • Tingkat <i>proximity</i> yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ketergantungan dan menghambat inovasi atau fleksibilitas dalam hubungan kerja sama
11.	(George et al., 2024)	<i>Do network management and trust matter for network outcomes? A meta-analysis and research agenda</i>	Penelitian ini berfokus pada peran manajemen jaringan (<i>network management</i>) dan kepercayaan (<i>trust</i>) dalam mempengaruhi hasil yang dicapai oleh jaringan (<i>network outcomes</i>).	• Dalam konteks tata kelola kolaboratif manajemen jaringan dan kepercayaan adalah elemen penting yang secara signifikan memengaruhi hasil jaringan. Karena meningkatkan koordinasi dan komunikasi antaraktor, yang berdampak akan positif pada hasil jaringan. • Kepercayaan, khususnya, memiliki peran krusial (penting sebagai pondasi utama) dalam meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan mengurangi ketidakpastian dalam jaringan tata Kelola.
12.	(Klijn et al., 2016)	<i>The influence of trust on network performance in Taiwan, Spain and The Netherlands: a cross</i>	Artikel ini membahas peran kepercayaan (<i>trust</i>) dalam memengaruhi kinerja jaringan (<i>network performance</i>). Dan menjelaskan hubungan antara	Ada hubungan yang positif antara Kepercayaan dan Kinerja Jaringan • Di semua negara, kepercayaan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja jaringan (Taiwan, Spanyol, dan Belanda). Karena aktor yang mempercayai mitra mereka lebih mungkin untuk:

		<i>country comparison</i>	kepercayaan dan kinerja jaringan.	- Berkomunikasi secara efektif. - Menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. - Mencapai tujuan jaringan dengan lebih efisien.
13.	(Nooteboom, 2011)	<i>The Dynamics Of Trust: Communication, Action And Third Parties</i>	Artikel ini mengkaji tentang bagaimana kepercayaan bisa berkembang melalui keterbukaan dan komunikasi, tindakan, dan peran pihak ketiga. Fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana kepercayaan dibangun, dipertahankan, atau bahkan dihancurkan, terutama dalam konteks hubungan antaraktor.	1. Peran Komunikasi Transparansi dan Kejelasan: Komunikasi yang jelas dan terbuka merupakan kunci dalam membangun kepercayaan, terutama untuk mengurangi ambiguitas. 2. Peran Tindakan • Konsistensi Tindakan: Kepercayaan bergantung pada konsistensi antara kata-kata dan tindakan nyata. • Keberlanjutan dalam Kolaborasi: Kepercayaan meningkat ketika tindakan mendukung kolaborasi yang berkelanjutan, sehingga menciptakan rasa saling ketergantungan. 3. Peran Pihak Ketiga Mediator atau Penjamin Kepercayaan: Pihak ketiga sering kali memainkan peran penting dalam membangun atau mengembalikan kepercayaan antar dua aktor.
14.	(Peters et al., 2017)	<i>Policy coordination and integration, trust, management and performance in public health related policy networks: a survey</i>	• Mengidentifikasi hubungan antara koordinasi kebijakan (<i>policy coordination</i>), integrasi kebijakan (<i>policy integration</i>), kepercayaan (<i>trust</i>), manajemen jaringan (<i>network management</i>), dan kinerja jaringan (<i>network performance</i>) dalam	Keberhasilan jaringan kebijakan kesehatan masyarakat sangat bergantung pada: 1. Koordinasi dan integrasi kebijakan yang efektif. 2. Kepercayaan antaraktor, yang berfungsi sebagai pengikat hubungan dan kolaborasi. 3. Manajemen jaringan yang mendukung proses komunikasi, distribusi sumber daya, dan penyelesaian konflik.

			jaringan kebijakan kesehatan masyarakat. Dan bagaimana elemen atau indikator tersebut saling memengaruhi untuk mendukung keberhasilan jaringan kebijakan kesehatan masyarakat.	4. Kinerja jaringan yang tinggi dapat dicapai dengan memaksimalkan sinergi antara elemen-elemen tersebut. Studi ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan integrasi kebijakan untuk kinerja jaringan, sedangkan manajemen dan kepercayaan merupakan faktor penting untuk terwujudnya perubahan tingkat koordinasi dan integrasi kebijakan. Jadi, temuan kami menunjukkan bahwa kinerja jaringan kebijakan terkait kesehatan masyarakat lokal mungkin tidak hanya mendapat manfaat dari penerapan strategi dan kepercayaan manajemen jaringan, tetapi juga dari investasi dalam koordinasi dan integrasi kebijakan public
15.	(Boaventura et al., 2016)	<i>Governance structures and trust: a study of real estate networks</i>	Mengkaji tentang hubungan antara struktur tata kelola jaringan (<i>governance structures</i>) dan kepercayaan (<i>trust</i>) dalam konteks jaringan bisnis <i>real estat</i>. Penulis mengeksplorasi bagaimana tata kelola memengaruhi tingkat kepercayaan di antara para aktor yang bekerja sama dalam jaringan, serta bagaimana hal ini berdampak pada efektivitas dan keberlanjutan hubungan bisnis	• Interaksi yang sering di antara agen pembuat keputusan memungkinkan pengembangan kepercayaan, menghasilkan kepatuhan terhadap model pengembangan kepercayaan yang diperkenalkan oleh Rousseau et al. (1998). • Struktur tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dalam jaringan bisnis real estat. • Kepercayaan, baik pada tingkat personal maupun institusional, memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan jaringan.
16.	(Costa Carnauba et al., 2020)	<i>Formal and relational mechanisms of network governance and their</i>	Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme formal dan relasional dalam tata kelola jaringan bertindak sebagai	Kedua mekanisme tersebut penting untuk membangun hubungan berbasis kepercayaan antar aktor dan mekanisme tata kelola formal memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kepercayaan antar-

		<i>relationship with trust: substitutes or complementary in Brazilian real estate transactions?</i>	pengganti atau pelengkap dalam kepercayaan.	organisasi, sedangkan mekanisme relasional dikaitkan secara positif dengan kepercayaan interpersonal.
17.	(Åm, 2011)	<i>Trust as Glue in Nanotechnology Governance Networks</i>	Artikel ini menyoroti bagaimana interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dapat mempengaruhi proses kebijakan dan pembentukan hubungan dan kepercayaan di antara para actor.	Studi ini menemukan bahwa kepercayaan berperan sebagai perekat dalam jaringan tata kelola nanoteknologi, membantu kelancaran pengembangan teknologi. Namun, meskipun forum pemangku kepentingan dibentuk untuk inklusivitas, hal ini justru bisa menciptakan eksklusif jika dialog terbatas dalam kelompok tertentu. Akibatnya, transparansi dan partisipasi publik bisa terhambat karena adanya control.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, belum ada yang mengkaji tentang bagaimana *trust* dalam jaringan bisa ditingkatkan melalui *Individuals Common Identity*, *Shared Value*, dan *Hopes for the Future*. Salah satu artikel diatas, yaitu *A Framework for Exploring Trust and Distrust in Natural Resource Management* yang ditulis oleh Jens Emborg, Steven E. Daniels, Gregg B. Walker (2020) menyebutkan bahwa ketiga faktor ini penting dalam meningkatkan *trust*, akan tetapi belum dikaji secara lebih mendalam.

Di dalam buku *Governance Networks in The Public Sector* yang ditulis oleh Eriks Hans Klijn dan Joop Koppenjan (2016) menjelaskan sedikit tentang salah satu faktor yang ada di atas, yaitu *Hopes for The Future*. Di dalam bukunya, faktor itu disebut dengan *The Expectation of Future Benefits*. Faktor tersebut dianggap dapat mempengaruhi muncul dan meningkatnya *trust* (Klijn & Koppenjan, 2016). Karena *trust* dalam suatu jaringan dapat berkembang ketika aktor-aktor di dalamnya menyadari bahwa interaksi yang dilakukan secara berkelanjutan akan saling menguntungkan di masa depan.

1.2.4. 3 Faktor yang Dapat Meningkatkan Trust

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, belum ada yang mengkaji tentang bagaimana 3 strategi atau faktor untuk meningkatkan *trust* dalam jaringan, yaitu dengan berfokus pada *Individuals Common Identity*, *Shared Value*, dan *Hopes for the Future*. Padahal hal tersebut merupakan faktor penting dalam jaringan yang bisa meningkatkan kepercayaan antar aktor. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah dengan menghadirkan ketiga faktor tersebut yang dapat meningkatkan *trust* dalam *governance networks*.

a. *Individuals Common Identity*

Hal ini merujuk pada kesamaan yang dimiliki oleh para aktor, seperti kesamaan tujuan, keyakinan, budaya, ataupun pengalaman.

Dengan menonjolkan kesamaan antar para aktor, maka kepercayaan lebih mudah terbentuk. Hal tersebut bisa dibentuk melalui komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dalam jaringan *governance* bukan sekadar pertukaran informasi, tetapi proses membangun pemahaman bersama. Melalui komunikasi yang terbuka, aktor dapat lebih memahami peran masing-masing, menyelaraskan tujuan, dan dapat mengurangi konflik.

b. *Shared Value*

Jaringan memiliki interaksi yang kompleks karena para aktor memiliki persepsi sendiri tentang masalah, solusi, dan strategi mereka (Klijn & Koppenjan, 2016). Hal tersebut yang menyebabkan adanya perbedaan substansial dalam persepsi, konflik nilai, dan ketidakpastian tentang kebijakan yang akan ditetapkan. Akan tetapi, perbedaan tersebut akan teratasi jika tumbuh persamaan nilai dalam jaringan.

Oleh karena itu, akan tumbuh keyakinan bahwa para aktor dalam jaringan akan bertindak sesuai dengan norma atau nilai bersama yang telah disepakati. Maka, kepercayaan akan tumbuh melalui kesamaan nilai yang dianut bersama (Fathy, 2019). Hal tersebut bisa dibentuk dari kolaborasi yang merupakan bentuk nyata dari kerja sama dalam pertukaran sumber daya, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan bersama. Karena nilai bersama akan terlihat dalam proses kerjasama.

c. *Hopes for the Future*

Dijelaskan dalam buku *Governance Networks in The Public Sector* (Klijn & Koppenjan, 2016), ada salah satu faktor untuk meningkatkan *trust*, yaitu *The Expectation of Future Benefits*. Interaksi yang dilakukan oleh para aktor secara terus menerus dalam jaringan dapat saling menguntungkan. Karena akan memungkinkan terjadi hubungan atau kerja sama yang lebih erat. Sehingga, mereka akan lebih cenderung untuk bisa

mempertahankan hubungan atau kerja sama tersebut. Maka, kepercayaan akan terbentuk di dalamnya yang dapat memperkuat kerja sama di masa depan (Klijn & Koppenjan, 2016). Harapan masa depan juga penting karena mengarahkan fokus para aktor pada tujuan jangka panjang yang dapat saling menguntungkan. Komitmen aktor dalam mempertahankan keterlibatan menunjukkan adanya internalisasi nilai dan harapan kolektif terhadap keberlanjutan jaringan, yang menjadi indikator menguatnya *trust* dalam *governance network*.

1.2.5. *Trust* dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan

Salah satu tahapan dari proses kebijakan publik adalah implementasi. Tahap ini menunjukkan bagaimana realisasi atau pelaksanaan kebutuhan dan kepentingan publik sebagai *target group* dari kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan publik, meliputi beberapa organisasi yang terlibat, baik pemerintah ataupun non-pemerintah. Sehingga, keberhasilan implementasi tersebut ditentukan dari kerja sama yang terjalin dari beberapa aktor yang ada dalam jaringan tersebut. Karena melibatkan banyak aktor dari organisasi atau lembaga lain, maka implementasi kebijakan publik merupakan suatu hal yang kompleks (Alwi, 2022).

Untuk bisa mengatasi kompleksitas tersebut, maka *trust* atau kepercayaan antar pemangku kepentingan atau aktor harus ada dalam jaringan. *Trust* ini penting sebagai modal dasar dalam pengembangan dan pertumbuhan jaringan yang efektif. Dalam jaringan terdapat interaksi atau kolaborasi yang membutuhkan kepercayaan antar aktor untuk bisa saling bertukar informasi, pengetahuan, ataupun ide-ide dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, dengan adanya kepercayaan, konflik dalam organisasi bisa bekurang.

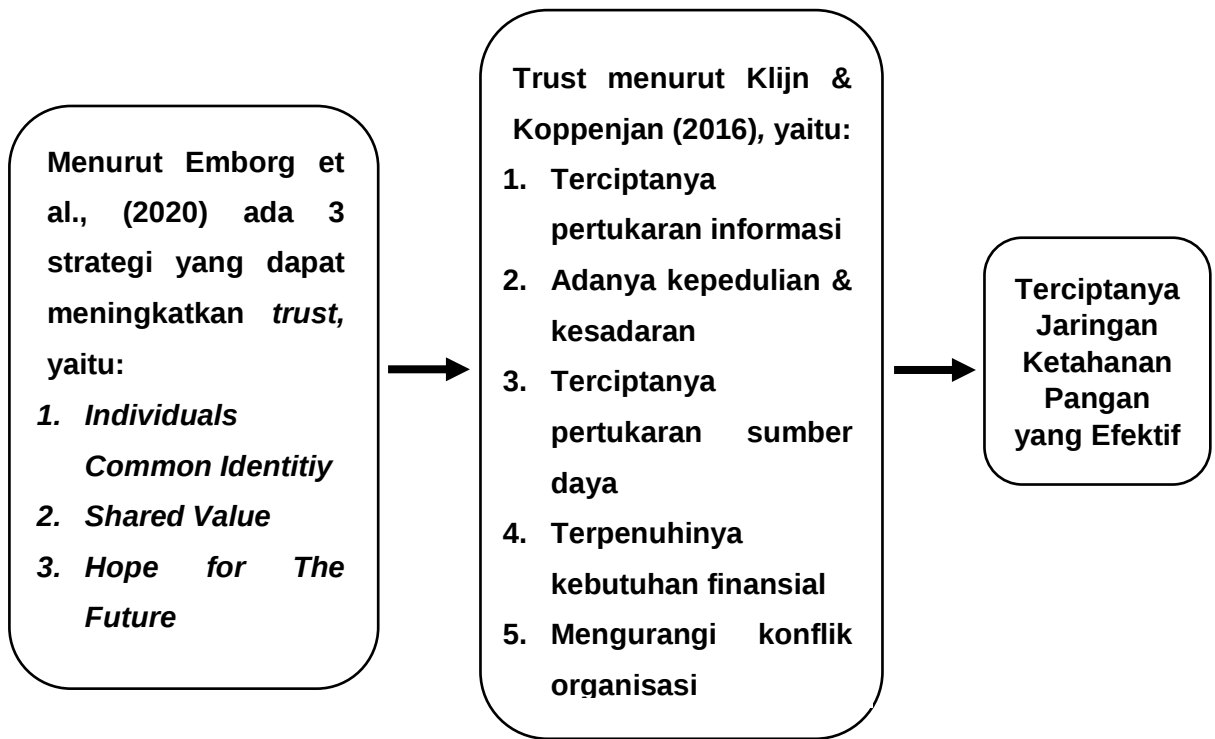
Kebijakan ketahanan pangan sebagai salah satu implementasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam upaya mensejahterakan

masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan 17 target SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang, diantaranya adalah tanpa kemiskinan, menghilangkan kelaparan, dan mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam pencapaian target tersebut, Badan Pangan Nasional memiliki tanggung jawab dan peran dalam melakukan koordinasi, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan ketahanan pangan. Hal ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan aktor lintas sektor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. *Food and Agriculture Organization* (FAO) mendefinisikan kondisi pangan harus memenuhi 4 (empat) komponen, yaitu kecukupan tersedianya bahan pangan, stabilitas tersedianya bahan pangan tanpa adanya fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, dan adanya aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap bahan pangan, serta terjaminnya kualitas dan keamanan bahan pangan yang digunakan. Berdasarkan buku Indeks Ketahanan Pangan tahun 2023, ketahanan pangan memiliki tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Pilar pertama, yaitu ketersediaan meliputi produksi pangan domestik, stok cadangan pangan, dan ekspor-impor. Pilar keterjangkauan terdiri atas distribusi, stabilisasi pasokan dan harga, system logistic, manajemen stok, daya beli masyarakat, dan akses terhadap pasar dan informasi. Pilar pemanfaatan meliputi perbaikan pola

konsumsi, keanekaragaman konsumsi, perbaikan gizi, serta keamanan dan mutu pangan.

1.2.6. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Kerangka ini menjelaskan bahwa *trust* menjadi fondasi utama dalam membangun jaringan Ketahanan Pangan yang efektif. *Trust* dapat terbentuk serta diperkuat melalui beberapa dimensi dan strategi. Trust dalam jaringan terbentuk melalui lima dimensi utama, yaitu terciptanya pertukaran informasi, adanya kepedulian & kesadaran, terciptanya pertukaran sumber daya, terpenuhinya kebutuhan finansial, dan dapat mengurangi konflik organisasi. Jadi, jika kelima dimensi ini terpenuhi, maka trust dalam jaringan akan terbentuk. Karena *trust* tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibangun melalui interaksi yang konsisten dan saling menguntungkan. Untuk memperkuat trust dalam jaringan, terdapat tiga strategi utama, yaitu *Individuals Common Identitiy*, *Shared Value*, dan *Hope for The Future*. Ketika ketiga faktor ini kuat, maka *trust* akan meningkat secara lebih stabil dan berkelanjutan. Semakin kuat *trust* yang terbangun melalui tiga strategi tersebut, maka semakin efektif pula koordinasi, kolaborasi, dan pencapaian tujuan dalam jaringan Ketahanan Pangan. Kerangka ini memberikan landasan teoritis untuk memahami bagaimana trust menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Ketahanan Pangan yang efektif.

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana *trust* dalam *Governance Networks* dan bagaimana *Individuals Common Identity*, *Shared Value*, dan *Hopes for the Future* dapat meningkatkan kepercayaan antar aktor dalam *governance networks* untuk mencapai keberhasilan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Maros.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan instansi terkait. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang mendalam terkait *trust*, *governance networks*, Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Maros, serta bagaimana kepercayaan dapat meningkatkan kinerja dalam *governance networks*. Sedangkan manfaat bagi instansi adalah dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu ketahanan pangan, bagaimana proses terciptanya kepercayaan antar aktor atau pemangku kepentingan, bagaimana merumuskan kebijakan yang bisa tepat sasaran, serta bagaimana meningkatkan kepercayaan antar aktor yang disebabkan karena adanya ketergantungan.

b) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian teori-teori yang berkaitan dengan *trust*, *governance network*, dan implementasi kebijakan. Terhusus untuk penelitian yang berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literasi dan perbandingan studi untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena peneliti berusaha menjelaskan secara luas dan mendalam bagaimana fenomena *trust* dalam *governance networks* dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Serta menjelaskan bagaimana proses dan strategi kepercayaan antar aktor dapat meningkatkan kinerja dalam *governance networks* dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Penelitian ini dijelaskan secara eksploratif yang sesuai dengan tipe desain penelitian studi kasus. Peneliti berupaya menjelaskan secara mendalam bagaimana fenomena yang terjadi (Yin,2009).

Menurut Creswell & Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang melibatkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial atau kemanusiaan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap pengalaman mereka.

2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *case study* (studi kasus). Studi kasus digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena tertentu dengan melakukan analisis data yang diperoleh dari satu atau beberapa kasus yang dipilih.

Desain penelitian studi kasus yang dipilih peneliti dimaksudkan karena peneliti membutuhkan analisis yang mendalam dari suatu fenomena *trust* atau kepercayaan dalam *governance networks* dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Fenomena kepercayaan dalam *governance networks* dan ketahanan pangan merupakan fenomena

yang kontemporer, sehingga desain studi kasus dianggap cocok dengan fenomena dan konteks kasus yang ada.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah Teknik pengambilan informan melalui pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah dengan menentukan informan atau kelompok orang yang dianggap lebih tahu mengenai apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 2. 1 Data Informan

Informan	Keterangan	Jumlah
Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Kepala Bidang	1
Kepala Bidang Penyuluhan	Kepala Bidang	1
Staff Bidang Ketahanan Pangan	Staff	1
Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	PPL KWT Purna Karya, Cahaya Dulang, dan Srikandi Tani Kecamatan Tanralili. KWT Mawar Keren, KWT Mawar, dan KWT Seruni Kecamatan Bantimurung.	6
Kelompok Wanita Tani (KWT)	KWT Purna Karya, Cahaya Dulang, dan Srikandi Tani Kecamatan Tanralili.	6

	KWT Mawar Keren, KWT Mawar, dan KWT Seruni Kecamatan Bantimurung.	
--	--	--

Sumber: Peneliti, 2025

2.3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada lokus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros dan rumah Ketua KWT di 3 KWT yang ada di Kecamatan Tanralili dan 3 KWT di Kecamatan Bantimurung.

2.3.3. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat informasi-informasi atau kejadian yang terjadi di lokasi penelitian (Creswell, 2018). Menurut Harahap (2020) observasi bisa dihubungkan sebagai upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah, dan memberikan pemahaman yang mendalam untuk menemukan pertanyaan yang akan digunakan dalam membuat angket atau kuesioner, serta menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.

Dalam observasi, peneliti hanya mencatat apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan karena observasi berisi fakta, bukan opini. Tapi, sebelum melakukan observasi peneliti terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan sesuai dengan gambaran informasi yang diperoleh dan menentukan sasaran observasi dan kemungkinan waktu yang diperlukan untuk melakukan observasi (Harahap, 2020).

Oleh karena itu, observasi dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap data atau informasi yang diperoleh, baik data primer ataupun data sekunder. Observasi dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian di Kabupaten Maros dengan mendatangi informan terkait.

b) Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu proses yang digunakan dalam penelitian untuk mengambil atau memperoleh data melalui kegiatan komunikasi secara lisan dalam bentuk terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur. Wawancara yang terstruktur adalah wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara selektif dan sudah ditentukan sebelumnya. Wawancara semi struktur sama dengan wawancara terstruktur, akan tetapi secara spontan pertanyaan baru muncul sesuai respon partisipan saat wawancara sedang berlangsung. Wawancara tidak terstruktur adalah peneliti hanya fokus terhadap inti permasalahan tanpa terikat daftar pertanyaan tertentu. Peneliti membiarkan percakapan berkembang secara alami (Harahap, 2020).

Wawancara dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pedoman wawancara yang di dalamnya berisi sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada informan yang sesuai. Proses wawancara dilakukan secara bertatap muka langsung antara pewawancara dan informan dengan santai agar jawaban informan mengalir begitu adanya, tetapi tetap dengan batasan fokus penelitian.

c) Telaah Dokumen

Telaah dokumen merupakan metode pengumpulan data untuk menelusuri data historis. Peneliti akan mencari informasi yang dapat mendukung atau memberi wawasan tentang

fenomena yang diteliti, seperti kebijakan, sejarah, atau laporan kejadian. Dokumentasi terbagi atas dua, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi merupakan catatan secara tertulis mengenai tindakan, kepercayaan, dan pengalaman. Sedangkan dokumentasi resmi terbagi menjadi dua, yaitu dokumentasi interen dan dokumentasi eksteren. Yang mana dokumentasi interen itu dapat berupa pengumuman, instruksi atau pedoman, memo, aturan lembaga seperti rapat dan kebiasaan-kebiasaan di dalamnya. Dokumentasi eksteren dapat berupa majalah, bahan-bahan yang dikeluarkan oleh pihak terkait, dan berita-berita dari media massa (Bungin, 2011).

Dokumen yang digunakan dalam pengambilan data adalah dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi yang didapatkan dari sumber primer dan sekunder. Sumber sekunder peneliti berusaha mencari dari beberapa penelitian terdahulu, berita di internet, dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2.3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Creswell (2018) jika menggunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian, maka bentuk analisis data yang dilakukan ialah dengan deskripsi secara mendalam atau detail mengenai kasus yang ada.

Dalam penelitian kualitatif, data dapat didapatkan dan dikumpulkan melalui berbagai teknik dan sumber (triangulasi) untuk meningkatkan validitas data. Proses pengumpulan data dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan sampai peneliti merasa bahwa data yang diperoleh sudah cukup (data bersifat jenuh). Menurut Miles dan Huberman (2014) ada beberapa langkah untuk melakukan analisis data, dapat dilakukan dengan interaktif dan terus menerus sampai tuntas dan datanya sudah jenuh, yaitu:

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, yaitu proses menyederhanakan atau merangkum data yang sudah diperoleh dari penelitian dengan

memilih hal-hal pokok atau inti dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data dimaksudkan untuk memfokuskan data agar relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, data yang sudah diperoleh dan direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan relevan serta dapat memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data lagi jika masih diperlukan.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah proses pengelompokan data dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Biasanya disajikan dalam bentuk naratif, matriks, dan grafik atau *chart*. Dengan menyajikan data seperti ini, maka akan memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c) Kesimpulan dan Verifikasis (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang bersifat sementara, karena data bisa saja berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan relevan pada pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika di tahap awal sudah ada bukti yang mendukung dan kuat pada saat pengumpulan data, maka pada saat peneliti kembali ke lapangan berarti kesimpulan yang dikemukakan sudah valid dan dapat dipercaya.

2.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas data dalam penelitian kualitatif menekankan ketepatan antara data yang diperoleh dan data yang terjadi pada objek penelitian. Bukan hanya soal apakah data tersebut benar atau tidak, tetapi juga apakah data tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau tidak. Validitas didasarkan pada kepastian apakah penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca (Creswell, 2018).

Reliabilitas merupakan konsistensi, keandalan, atau ketepatan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengukuran atau pengumpulan data. Reliabilitas mengukur sejauh mana suatu instrumen atau metode pengumpulan data dapat memberikan hasil yang konsisten dan sesuai jika digunakan berulang kali dalam waktu yang berbeda atau oleh peneliti yang berbeda. Karena data pada penelitian kualitatif dianggap reliabel apabila sesuai dengan realitas yang terjadi dan hasilnya akan tetap sama atau tidak berubah.